



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT 1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN <https://kkp.go.id/djpt>, EMAIL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1600/DJPT.2/TU.330/III2023 27 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Teknis *Log Book*
Penangkapan Ikan Tahun 2023

Yth.
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan penerapan *log book* penangkapan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bermaksud menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis *Log Book* Penangkapan Ikan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Selasa-Jum'at, 04 April - 07 April 2023
waktu : 08.00 WIB - Selesai
tempat : Grand Mercure Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto No.80, Demangan Baru,
Caturtunggal, Sleman, DIY.
agenda : terlampir

Sehubungan dengan hal di atas, kami mengundang Saudara untuk menghadiri pertemuan dimaksud. Mengingat pentingnya acara, dimohon Saudara hadir tepat waktu dan membawa bahan terkait.

Panitia hanya menanggung biaya akomodasi penginapan dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Format bahan dan konfirmasi kehadiran sebagaimana Lampiran 3 dan 4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ridwan Malik (HP. 0877-4958-3167).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Putuh Suadela

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1.

Nomor : B.1600/DJPT.2/TU.330/III/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Teknis *Log Book* Penangkapan
Ikan Tahun 2023

DAFTAR PIHAK YANG DIUNDANG

A. Satuan Kerja Lingkup Pusat

No.	Nama Jabatan/Instansi	Jumlah
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap;	1 orang
2.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;	1 orang
3.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan;	1 orang
4.	Direktur Perizinan dan Kenelayanan;	1 orang
5.	Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama;	1 orang
6.	Ketua Kelompok Kerja Pemantauan, Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
7.	Ketua Kelompok Kerja SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
8.	Ketua Kelompok Kerja SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
9.	Ketua Kelompok Kerja SDI Perairan Darat, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
10.	Ketua Subpokja Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
11.	Ketua Subpokja Pemantauan Pengelolaan SDI, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
12.	Ketua Subpokja Tata Usaha, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
13.	Dr. Diding Sudira Efendi, S.Pi, M.Si, Analis Sumber Daya Ikan, Dit. PSDI;	1 orang
14.	Syahrir Mardani, ST, Pranata Komputer Ahli Muda, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
15.	Ilham, S.Pi, M.Si, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
16.	Wiwik Wulandari, A.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
17.	Rosdiani, S.Pi, M.P, Analis Sumber Daya Ikan, Dit. PSDI;	1 orang
18.	Rista Devi Juniar, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
19.	Indah Pratiwi Kamba, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Dit. PSDI;	1 orang
20.	Dimas Yupi Angga, S.St.Pi, Analis Sumber Daya Ikan, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang

No.	Nama Jabatan/Instansi	Jumlah
21.	Rahmad, A.Md, Pengolah Data, Dit. Pengelolaan SDI;	1 orang
22.	Febriaulia Rembulan, S.K.M, Pelaksana pada Dit. PSDI;	1 orang
23.	Ridwan Malik, S.St.Pi, Pelaksana pada Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;	1 orang
24.	M. Aris Setiawan I, S.I.K, Pelaksana pada Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;	1 orang
25.	Iwan Tri Winantya, Tim IT.	1 orang

B. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis

No.	Nama Jabatan/Instansi	Jumlah
1.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;	1 orang
2.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;	1 orang
3.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;	1 orang
4.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;	1 orang
5.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari;	1 orang
6.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;	1 orang
7.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;	1 orang
8.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;	1 orang
9.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;	1 orang
10.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;	1 orang
11.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;	1 orang
12.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga;	1 orang
13.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual;	1 orang
14.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;	1 orang
15.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;	1 orang
16.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;	1 orang
17.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan;	1 orang
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat;	1 orang
19.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;	1 orang
20.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu;	1 orang
21.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang;	1 orang
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;	1 orang
23.	Penanggung Jawab Pengelola PP Perintis Lugu Simeuleu Aceh;	1 orang
24.	Penanggung Jawab Pengelola PP Perintis Cikidang;	1 orang
25.	Penanggung Jawab Pengelola PP Perintis Teluk Awang;	1 orang
26.	Penanggung Jawab Pengelola PP Perintis Dagho;	1 orang
27.	Penanggung Jawab Pengelola PP Perintis Saumlaki;	1 orang
28.	Penanggung Jawab Pengelola PP Terpadu Merauke;	1 orang
29.	Penanggung Jawab Pengelola PP Terpadu Natuna-Kepulauan Riau;	1 orang
30.	Penanggung Jawab Pengelola PP Terpadu Sebatik;	1 orang
31.	Penanggung Jawab Pengelola PP Terpadu Untia.	1 orang

C. Satuan Kerja Lingkup Daerah

No.	Nama Jabatan/Instansi	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh;	1 orang
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;	1 orang
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;	1 orang
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;	1 orang
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;	1 orang
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;	1 orang
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;	1 orang
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;	1 orang
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	1 orang
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;	1 orang
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta;	1 orang
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;	1 orang
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat;	1 orang
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;	1 orang
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan D.I Yogyakarta;	1 orang
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur;	1 orang
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;	1 orang
18.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat;	1 orang
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur;	1 orang
20.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;	1 orang
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;	1 orang
22.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;	1 orang
23.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;	1 orang
24.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;	1 orang
25.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;	1 orang
26.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;	1 orang
27.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo;	1 orang
28.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;	1 orang
29.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara;	1 orang
30.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;	1 orang
31.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;	1 orang
32.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;	1 orang
33.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;	1 orang
34.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.	1 orang

D. Mitra Kerja Dit. PSDI

No.	Nama Jabatan/Instansi	Jumlah
1.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN);	1 orang
2.	Yayasan MDPI;	1 orang
3.	Yayasan IPNLF Indonesia (YII);	1 orang
4.	AP2HI.	1 orang

a.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
P/n Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Putri Suadela

Lampiran 2.

Nomor : B.1600/DJPT.2/TU.330/III/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Teknis *Log Book* Penangkapan
Ikan Tahun 2023

**AGENDA TENTATIF
RAPAT KOORDINASI TEKNIS LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN TAHUN
2023**

Waktu	Acara	Penyaji / Narasumber	Keterangan
Selasa, 04 April 2023			
14.00 - 17.00	<i>Check in</i>	Panitia	
Rabu, 05 April 2023			
08.00 - 09.00	Registrasi Peserta		
Pembukaan			
09.00 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
09.10 - 09.15	Pembacaan Doa	Ridwan Malik, S.Pi	
09.15 - 09.45	Laporan dan Sambutan:		
	• Laporan Ketua Panitia	Ketua Kelompok Kerja Pemantauan, Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI	
	• Sambutan Selamat Datang	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DI Yogyakarta	
	• Sambutan dan Arahan	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	
	Pemberian Penghargaan kepada Pelabuhan Perikanan yang telah menerapkan <i>Log book</i> Penangkapan Ikan	Panitia	
	Sesi Foto Bersama	Panitia	
Panel Sesi Pertama			
09.45 - 12.00	Arah Kebijakan Pengelolaan SDI Tahun 2020-2024	Direktur Pengelolaan SDI	Moderator: Ketua Kelompok Kerja Pemantauan, Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI
	Dukungan Pelabuhan dalam Peningkatan Pelaksanaan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	
	Implementasi Data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dalam Perizinan Berusaha	Direktur Perizinan dan Kenelayanan	

Waktu	Acara	Penyaji / Narasumber	Keterangan
	Implementasi Data <i>Log Book</i> Penangkapan dalam mendukung Operasional Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Notulis: Rosdiani, S.Pi, M.P
12.00 - 13.00	<i>Break</i>		
Panel Sesi Kedua			
13.00 - 15.00	Dukungan <i>Log Book</i> dalam Pemenuhan Kepatuhan RFMO	Ketua Kelompok Kerja SDI ZEEI dan Laut Lepas	Moderator : Ketua Subpokja Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI Notulis: Febricaulia Rembulan, S.K.M
	Penerapan <i>Log Book</i> Perairan Darat	Ketua Kelompok Kerja SDI Perairan Darat	
15.00 - 15.30	<i>Break</i>		
Panel Sesi Ketiga			
15.30 - 17.30	Dukungan <i>Log Book</i> dalam Penyusunan RPP	Ketua Kelompok Kerja SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan	Moderator: Ketua Subpokja Pemantauan Pengelolaan SDI Notulis: Wiwik Wulandari, A.Pi
	Dukungan Riset dalam Pengembangan Logbook Penangkapan Ikan	Kepala Pusat Riset Perikanan, BRIN	
Kamis, 6 April 2023			
Panel Sesi Pertama			
08.00 - 09.15	Penerapan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan Tahun 2022	Ketua Kelompok Kerja Pemantauan, Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI	Moderator : Ilham, S.Pi, M.Si Notulis : Rosdiani, S.Pi, M.P
	Evaluasi Penerapan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan Tahun 2022	Ketua Subpokja Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI	
Panel Sesi Kedua (Terlampir Format Bahan Paparan)			
09.15 - 12.00	<i>Lesson Learned</i> (Pembelajaran)	Kepala PPSNZJ	Moderator: Ketua

Waktu	Acara	Penyaji / Narasumber	Keterangan
	Penerapan <i>e-Log Book</i> Penangkapan Ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta		Subpokja Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI Notulis : Wiwik Wulandari, A.Pi
	<i>Lesson Learned</i> (Pembelajaran) Penerapan <i>e-Log Book</i> Penangkapan Ikan di PPN Prigi	Kepala PPN Prigi	
	<i>Lesson Learned</i> (Pembelajaran) Penerapan <i>e-Log Book</i> Penangkapan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur	
	<i>Lesson Learned</i> (Pembelajaran) Penerapan <i>e-Log Book</i> Penangkapan Ikan oleh Mitra	YKAN	
12.00 - 13.00	<i>Break</i>		
Panel Sesi Ketiga			
13.00 - 16.00	Data Observer dalam mendukung Validasi Data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	Ketua Subpokja Pemantauan Pengelolaan SDI	Moderator : Dr. Diding Sudira Efendi, S.Pi, M.Si Notulis : Febricaulia Rembulan, S.K.M
	Data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dalam mendukung Kebijakan PIT	Ilham, Spi, M.Si	
	Pengenalan dan Praktek Aktivasi <i>e-Log Book</i> Penangkapan Ikan dalam Aplikasi e-PIT	Tim IT	
Jumat, 7 April 2023			
08.30 - 11.30	Rumusan	1. Dr. Diding Sudira Efendi, S.Pi, M.Si; 2. Ilham, S.Pi, M.Si.	
	Penutupan	Ketua Kelompok Kerja Pemantauan, Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI	
11.30 - 12.00	<i>Check out</i>	<i>Panitia</i>	

Lampiran 3.

Nomor : B.1600/DJPT.2/TU.330/III/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Teknis *Log Book* Penangkapan
Ikan Tahun 2023

FORMAT PENYIAPAN BAHAN PESERTA

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Daftar Permasalahan di Setiap Unit Pelaksana Teknis	Kendala aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan di setiap pelabuhan perikanan
2.	<i>Lesson Learned</i> (Pembelajaran) Penerapan e-Logbook Penangkapan Ikan di 3 (tiga) pelabuhan perikanan, 1 (satu) DKP, dan 1 Mitra Dit. PSDI dalam bentuk bahan paparan	Format paparan : a. Pengantar/kondisi pelabuhan perikanan (3-5) slide; b. Jumlah kapal di pelabuhan perikanan (1-2) slide; c. Jumlah kapal yang diaktivasi dan identitasnya (3-5) slide; d. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan.

Lampiran 4.

Nomor : B.1600/DJPT.2/TU.330/III/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Teknis *Log Book* Penangkapan
Ikan Tahun 2023

LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit/Satuan Kerja :

Alamat Kantor :

Telp/Fax/HP :

Email :

Menyatakan dengan ini kesediaan untuk menghadiri **Rapat Koordinasi Teknis *Log Book* Penangkapan Ikan Tahun 2023** pada tanggal 04 April s.d. 07 April 2023 di Yogyakarta, DIY.

Mengetahui

....., Maret 2023

Atasan Langsung,

Peserta,

.....

.....

Minutes off Meeting

Rapat Koordinasi Teknis Penerapan Logbook Penangkapan Ikan (LBPI) KKP Tahun 2023 Grand Mercure, Yogyakarta 5 – 6 April 2023

Date of Meeting	:	5 – 6 April 2023
Time	:	09.00 – 17.00
Place/Venue	:	Grand Mercure Yogyakarta
Purpose of Meeting	:	Rapat Koordinasi Teknis Logbook Penangkapan Ikan Tahun 2023 dalam rangka Evaluasi dan peningkatan penerapan logbook penangkapan ikan
Participants	:	<ul style="list-style-type: none">- Direktur PSDI KKP (Ridwan Mulyana)- Direktur KAPI- Direktur Kepelabuhanan Perikanan- Direktur Perizinan dan Kenelayanan- Ketua-ketua Kelompok Kerja PSDI KKP dan Team- Pelabuhan-pelabuhan (PPN dan PPS) Satker UPT KKP- SKPD (DKP Provinsi)- AP2HI (Herman dan Rengga)- YKAN (Bu Shinta)- MDPI (Santri)
Summary of Discussion	:	

HARI 1 (5 APRIL 2023)

Pembukaan: MC Opening, Pembacaan Do'a, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sambutan Ketua Panitia (Pak Aris Budiarto):

Topik kegiatan:

1. Penyampaian evaluasi kinerja implementasi LBPI tahun 2022.
2. Informasi terbaru kebijakan pengelolaan perikanan yang berkembang saat ini, baik untuk dalam negeri maupun RFMO.
3. Merumuskan dukungan teknis LBPI dalam rangka pelaksanaan kebijakan PIT sesuai dengan mandate PP No 11/2023.
4. Menyusun langkah strategis peningkatan aktivasi, kepatuhan dan validitas data serta pemanfaatan analisis log book penangkapan ikan sebagai bahan kebijakan pengelolaan perikanan secara holistic dari hulu sampai hilir.

Sambutan DKP DIY Yogyakarta (Ir. Bayu Mukti Sasongko)

DKP Prov. Yogyakarta tentu sangat mendukung dalam mengembangkan potensi perikanan tangkap di berbagai jalur; peningkatan kapasitas pelayanan perizinan tangkap, peningkatan sdm nelayan dalam rangka pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Ada PPP baru, dari pendaratan ikan menjadi PPN (Daerah Kesing).

Penyerahan Penghargaan Penerapan Logbook Terbaik;

Kategori Satker UPT Pusat Terbaik penerapan logbook penangkapan ikan:

- Juara 1: PPN Ambon
- Juara 2: PPN Pemangkat
- Juara 3: PPN Ternate.

Kategori UPTD Terbaik Penerapan Logbook penangkapan ikan:

- Juara 1: PPP Kidang Lor
- Juara 2: PPI Sodoha
- Juara 3: PPP Bacan.

Sambutan Direktur PSDI-KKP (Dr. Ir. Ridwan Mulyana)

Tema sambutan: Implementasi Program Penangkapan Ikan Terukur.

- LPJM 2020-2024; Kolaborasi, Sinergi antar sector maupun pemerintah pusat dalam menjawab regulasi PIT PP 11 tahun 2023.
- Kebijakan PIT menjadi acuan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesehatan laut, ekologi, biodiversitas dan juga kesejahteraan nelayan, termasuk menghapus IUU
- Data logbook merupakan kunci dalam menerapkan kebijakan PIT, akan menjadi salah satu pertimbangan kuota nelayan local dalam setiap provinsi. Peran LBPI penting untuk pelaksanaan PNBK pasca produksi, laporan data produksi yang dilaporkan nahkoda didukung dengan laporan perhitungan mandiri (LPM) dari pelaku usaha. Titik kritis atau tantangan yang perlu diantisipasi yaitu jangan sampai karena PNBK pasca produksi, nelayan jadi tidak akurat dalam pelaporan/mengurangi laporan hasil tangkapan
- LBPI memiliki keunggulan dalam hal
 1. Data mewakili setiap kapal
 2. Data menunjukkan lokasi fishing round
 3. Data setting dan hauling.
 4. Data ETP (selama ini jarang dilaporkan)
- Penghitung volume hasil tangkapan nahkoda dilakukan dengan penimbangan berdasarkan perhitungan volume palka, penggunaan keranjang, metode lain yang ditetapkan Menteri.
- Perlu diatur mekanisme memverifikasi kesesuaian LBPI dengan data ikan yg didaratkan di pelabuhan perikanan. Untuk kalibrasi data jumlah dan jenis ikan.
- Digunakan instrument realisasi pemanfaatan kuota yang diberikan ke pelaku usaha. Sekaligus evaluasi untuk tahun berikutnya.
- Datanya perlu diolah dan dianalisis untuk mengetahui indikator pengelolaan: CPUE, produktivitas, komposisi dll (penentuan kebijakan pengelolaan perikanan, penetapan kuota, dan pengelolaan perikanan strategi lainnya)
- Dibutuhkan kegiatan kolaborasi validasi data perikanan antar pemerintah, asosiasi, NGO untuk meningkatkan akurasi penerapan kebijakan PIT

SESI PEMAPARAN MATERI (PANEL) HARI 1

Aris Budianto

“Arah Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Khususnya Dalam Mendukung Penerapan PIT”

- Divisi pengelolaan perikanan ini sudah ada di dalam undang undang perikanan. Dipertegas dalam perpu nomor 2 tahun 2002 yang merupakan tindak lanjut dari undang undang Cipta Kerja itu di mana divisi pengelolaan perikanan itu adalah sebuah upaya termasuk proses yang terintegrasi, baik dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi penegakan hukum dari peraturan perundang undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya di perairan dan tujuan yang telah disepakati. Jadi yang digaris bawahi terkait dengan kegiatan pada hari ini, waktu penangkapan ikan itu adalah bagian dari proses pengumpulan informasi yang tentunya nanti akan dilakukan analisis dari data tersebut yang menginginkan untuk menjadi kebijakan yang dilakukan pemerintah.
- LBPI bagian dari pengumpulan informasi, di analisis, membentuk kebijakan untuk tujuan ekologi, ekonomi, kesejahteraan.
- Masih ada keterbatasan data. Data yang banyak hanya data landing, sementara data observed on board, data riset, data biologis data pengukuran pengukuran ikan masih sedikit.
- Dari 11 WPPNRI dibagi menjadi 6 zona. Biru untuk industry, hijau untuk nelayan local.
- Isu dan permasalahan umum dalam pengelolaan SDI:
 1. Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing;
 2. Overfishing;
 3. Degradasi habitat dan lingkungan SDI;
 4. Perlu peningkatan tata kelola perikanan (kelembagaan, rencana pengelolaan);
 5. Perlu perbaikan data perikanan; dan
 6. Pemanfaatan ekonomi belum optimal: (kontribusi PNBP, pemerataan manfaat ekonomi).
- Stakeholders kumpul untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan tata kelola.
- Revitalisasi perikanan tangkap Indonesia; pendekatan sekarang berbasis EAFM. Semua aspek menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi.
- Ada 4 aspek utama perikanan tangkap: biologi, lingkungan, social, dan ekonomi.
- Implementasi blue economy, efisiensi pengelolaan SDA, manfaat ekonomi dan social yang seimbang, menjaga kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati dari ketiga prinsip itu keluar kebijakan PIT.

- Reformasi pengelolaan SDI untuk mendukung blue economy; Dahulu pendekatan bersifat konvensional, yaitu dilihat input control (perizinan jumlah kapal misalnya), hanya kuantitas yang diperhatikan tanpa memperhatikan kualitas, PNBP dipungut pra produksi tanpa menghitung hasil tangkapan yang didaratkan. Reformasi yang dilakukan dari input menjadi output control.
- Aspek pengaturan kuota; kuota untuk nelayan local, kuota bukan untuk tujuan komersial, kuota untuk industry.
- Dampak PIT kesehatan laut terjaga, distribusi pertumbuhan ekonomi, jadi dimana nelayan menangkap, maka disitu melakukan bongkar. Peningkatan pnbp. Serapan tenaga kerja, kesejahteraan meningkat.
- Rancangan Perhitungan Kuota Penangkapan Ikan: Dasarnya Kepmen KP No 19/2022, disini kecuali tuna dan cakalang.
- Kuota industry, kuota nelayan local, kuota bukan untuk tujuan komersial.
- Untuk membagi kuota industry ada 5 variabel; jumlah nelayan, jumlah ukuran kapal, data logbook, karakteristik SDI, produksi ikan hasil tangkapa yang didaratkan.
- Prinsip penangkapan terukur/kuota adalah tetap membuka peluang untuk nelayan kecil, nelayan provinsi, nelayan industry pemain baru.
- Proses penyusunan RPP dimulai dari pembentukan tim penyusun, dokumen awal, konsultasi public, perumusan dokumen fina, penetapan dokumen, menghasilkan dokumen RPP, penetapan dokumen, evaluasi. Setiap 5 tahun RPP direview.
- PSDI mengharapkan semua mendukung operasional dalam pengelolaan perikanan di setiap WPPNRI untuk mendukung konsep zonasi PIT.
- *Pada pokoknya adalah:*
 1. *Bagaimana cara membagi kuota.*
 2. *Aplikasi E PIT yang menggabungkan 7 aplikasi menjadi satu.*
 3. *Bagaimana logbook akan bekerja ke depannya.*

Pak Agung

Dukungan Pelabuhan Perikanan Dalam Penerapan Log Book Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan

- Fungsi Pelabuhan: fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan.
- Peranan data untuk keberlanjutan perikanan tangkap; statistic, log book, observer, riset. Untuk menentukan kebijakan yang tepat, menentukan model pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.
- Peran pelabuhan perikanan: pendataan, pelayanan, tata kelola, pengendalian, dan pemantauan.
- Logbook penangkapan untuk kapal > 5 GT menggunakan e-log book, dan kapal <5 GT log book yang disederhanakan
- Dalam rangka pelaksanaan Monitoring Control Surveillance (MCS) di pelabuhan perikanan, kesyahbandaran di pelabuhan perikanan melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kapal Perikanan serta usaha perikanan.

- Ketelusuran: tujuan untuk mencatat produk dari bahan baku sampai ke konsumen, yang juga menjadi diantara syarat permintaan pasar terhadap produk perikanan: yang memiliki kualitas yang baik, legal, harga yang pantas dan keberlanjutan.
- *Inti: fungsi pelabuhan penting bertugas untuk melaksanakan fungsi monitoring control surveillance (MCS). PNBP tergantung pencatatan hasil di pelabuhan perikanan.*

Pak Hamdan

Pelaksanaan Penarikan PNBP Sumber Daya Alam Perikanan Pascaproduksi.

- Filosofi pengelolaan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan itu sifatnya terbatas dan bisa pulih, tetapi harus dijaga. Dalam pengelolaan perikanan, hukum asal dari penangkapan ikan adalah dilarang, kecuali bagi yang mempunyai izin.
- Jumlah kapal tidak mengindikasikan keuntungan atau pemanfaatan optimal. Namun justru yang terjadi adalah setiap kapal menangkap ikan sebanyak-banyaknya, bukan mempertahankan mutu dengan baik. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki *culture*/budaya penangkapan ikan di negara kita. Apalagi dengan adanya kuota, maka mereka bisa berpikir bahwa memanfaatkan kuota sebanyak-banyaknya.
- Kebijakan dan program kelautan dan perikanan; Butuh kebijakan yang tepat dan berbasis data saintifik terbaik. Ada 5 program untuk ekonomi biru, salah satunya yaitu penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
- Titik optimum dan berkelanjutan diharapkan dapat terealisasi melalui penangkapan ikan terukur. Bagaimana titik optimum dicapai? Yaitu Saat orang bekerja dengan legal masih menguntungkan daripada yang illegal.
- Variabel utama PIT: kuota sumberdaya ikan (pemanfaatan sesuai dengan daya dukungnya), zona, pengawasan (dukungan pengawasan yang terintegrasi dari hulu-hilir), kapal (titik optimum jumlah kapal dan patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku), penarikan PNBP (untuk memperoleh penerimaan negara yang optimal dan hasilnya didistribusikan ke masyarakat, sehingga pembangunan menjamin pemerataan dan keadilan), sinergi (hulu-hilir, pemerintah pusat-daerah, sinergi antar sektor).
- Transformasi pengelolaan PNBP SD perikanan saat ini yakni dengan penarikan Pra Produksi: penarikannya berdasarkan estimasi hasil kedepan berapa.
- Penarikan Pasca Produksi: penarikannya berdasarkan *real* hasil tangkapan yang telah diperoleh.
- Rumus perhitungan Pra dan pasca pada prinsipnya hampir sama, namun untuk pasca produksi lebih real karena penghitungannya termasuk penarikan PNBPnya sesuai hasil tangkapan yang didaratkan.
- Tujuan PIT:
 1. Tata kelola yang lebih terukur, adil dan terkendali
 2. Pendataan yang lebih lengkap dan akurat
 3. Perbaikan tata kelola perikanan secara keseluruhan (perbaikan tata kelola pelabuhan pangkalan, dll)
- Dasar hukum pelaksanaan penarikan PNBP SDA Perikanan pasca produksi yaitu PP No 85 tahun 2021.

- PNBP terutang (UU No. 9/2018/Tentang PNBP)
- PNBP terutang dihitung oleh: Official assessment (instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola PNBP) dan Self assessment (wajib bayar).
- Tentang APLIKASI E PIT: Logbook sering diabaikan karena tidak ada sanksinya. Walaupun sudah no logbook no SPB, tapi tetap saja ada yang mengabaikan. Sehingga perlu ada sedikit penekanan bahwa misalnya jika tidak mengisi log book, maka STBLKK tidak boleh diterbitkan. Semua harus E-PIT. Kalau manual, mereka nanti tidak akan mengerjakan pengisian di aplikasi E-PITnya.
- Alur: logbook, STBLKK, laporan perhitungan mandiri (LPM), bayar pasca, SLO dan SPB.
- Selain data produksi penangkapan ikan, saat ini untuk transshipment sudah dapat diisi di e log book (E-PIT saat ini).
- Saran pengembangan log book:
 1. Pengembangan metode penghitungan ikan di atas kapal yang efektif dan akurat
 2. Review kesesuaian alur proses pengisian logbook dengan kondisi alur kerja di atas kapal untuk meminimalisir kendala
 3. Update master data ikan (jenis, foto, nama lokal)
 4. Integrasi data logbook dengan data observer
 5. Peningkatan kompetensi nakhoda (mencari metode penghitungan hasil tangkapan yang akurat. Karena keakuratan penghitungan yang ditulis oleh nakhoda masih diragukan sifat keakuratannya)

Pak Mochammad Rachadian Prayoga

Implementasi Data Log Book Dalam Mendukung Operasional Kapal Perikanan dan API

- Kapal dan log book sangat erat kaitannya. Dalam pendaftaran kapal perikanan, produk akhirnya adalah Buku Kapal Perikanan (BKP/E-BKP) dan nomor registrasi kapal perikanan.
- Dokumen fisik; permen 33, merubah BKP menjadi E-BKP. Tidak ada pelaku usaha yang ngeluh karena hilang karena buku kapalnya telah online. Kebijakan ini sudah dimulai per 2021 yang lalu.
- E-BKP dipisahkan berdasarkan warna. Warna merah untuk izin pusat dan warna kuning izin provinsi dan nelayan kecil di bawah 5 GT. Izin pusat > 30 GT > 12 mil. Provinsi <30 Gt < 12 MIL.
- E-BKP perlu digerakkan lagi. Hingga saat ini baru diterbitkan oleh 17 provinsi yang sudah dilakukan penerapan
- Data E-BKP terintegrasi dengan semua aplikasi yang digunakan oleh KKP untuk memanggil/mencari daftar kapal.
- Kedepan, akan semakin banyak lagi data yang dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan ke depannya. Diantaranya untuk kebutuhan untuk menentukan selektivitas dan kapasitas alat penangkapan ikan.

Q&A

Questions

1. PPN Sibolga:

- Permasalahan pasca: terkait pengisian log book, setelah terkirim, masuk ke pemilik tidak bisa diedit, padahal kapten mengisi lebih banyak daripada pemilik. Jadi yang dibayarkan yang mana acuannya?
- Sipi pascaproduksi kuotanya masih 0. Kuota kedepan seperti apa? Metode penentuan kuotanya bagaimana?

2. Pak Ibrahim: PPN Brondong

- Rancangan perhitungan kuota, tidak punya izin tapi aktif melakukan penangkapan. Ada izin daerah tapi tidak pernah dilaporkan ke e log book. Ada sanksi? Atau bagaimana?.
- Masukan untuk Pak Hamdan, selaku Dit. Perizinan dan Kenelayanan yaitu sebaiknya dilakukan penetapan pelabuhan pangkalan PIPP.
- Kapal pasca produksi, kenyataan di lapangan karena 2 pangkalan di sipinya jadi mereka memilih pendaratannya. Itu hak pemilik kapal untuk pangkal dimana. Sementara, di pelabuhan pangkalan yang disinggahi oleh kapal tsb adalah terdapat kendala terkait sarana, terkait pola, untuk kapal 60 GT sudah tidak bisa masuk. Itu bagaimana?

3. Pak akmala:

- Teknis dari awal log book sampai dengan pembayarannya mohon dijelaskan.
- Ada kejadian bahwa ada kapal yang mendaratkan di pelabuhan tapi yang didaratkan adalah sebagian, itu bagaimana penghitungan pasca produksinya?
- Kenapa yang merubah verifikasi itu petugas? Seharusnya mereka (pelaku usaha) yang mengubah. Petugas hanya memberi tahu kalau harus di rubah setelah dilakukan verifikasi dari data bongkaran.

Answers

1. Pak Aris Budiarto

log book ada dari kertas, nanti staf yang melakukan verifikasi. Pada saat bongkar itu ada petugas yang akan mendampingi. Tahapan verifikator, ada yang di pelabuhan dan ada yang di pusat. Mengawati lewat aplikasi, ada 5 kriteria. Kesesuaian, hasil tangkapan dengan lama trip, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap. Nanti disitu pemiliki justifikasi alasannya jika ada perbedaan dari logbook dan dari data bongkaran. Kapal aktif yang berijin pusat, daerah, dan kecil yang mendapatkan kuota. Karena disana alat tangkap masih banyak cantrang, jadi izinnya tidak ada

2. Pak Hamdan

Verifikasi adalah yang dilakukan oleh pusat, bukan orang pelabuhan. Verifikasi bukan dilakukan pas saat penimbangan. Verifikasi membandingkan laporan mandiri oleh pelaku usaha dengan hasil bongkaran. Apabila ada selisih maka akan ditagih. Petugas tidak boleh mengisikan log book, atau Laporan Perhitungan Mandiri (LPM). Tugas petugas hanya mengingatkan. Mengenai teknis verifikasi: apabila data LPM lebih besar dari pembanding maka tidak akan ditarik PNBPNya. Apabila LPM lebih kecil dari data pembanding maka akan ditarik PNBPNya.

After Break

Fery Sutyan

Dukungan Logbook Penangkapan Ikan dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan

- Harus ada perencanaan dalam pengelolaan perikanan. Karena perencanaan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan.
- RPP ada dua: RPP berdasarkan wilayah (WPP) laut dan darat dan RPP berdasarkan jenis ikan.
- Isi RPP: Pendahuluan, status perikanan (SDI, lingkungan SDI, sosek, tata kelola), rencana strategis pengelolaan perikanan, dan evaluasi.
- RPP harus diupdate minimal 1 kali dalam 5 tahun. Setelah jadi RPP, harus dibuat harvest strategy juga.
- Hubungan dengan log book? Data log book data yang paling bagus, karena ada lokasi. Log book menyediakan komposisi hasil tangkapan. Log book untuk memonitoring pemanfaatan SDP. Isu terkait dengan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan Pendataan merupakan Isu Dominan yang ada di RPP. Implementasi log book penangkapan ikan menjadi penting dalam menjawab kedua isu tersebut.

Yayan Hernuryadin

Dukungan LBPI dalam Implementasi Aturan Pengelolaan Perikanan Tuna di RFMO

- Tuna pengelolaannya harus dilakukan beberapa negara. Indonesia punya potensi sumberdaya tuna yang besar.
- Indonesia sudah ratifikasi UNCLOS. Indonesia Punya UU nasional yang berkaitan dengan pengelolaan. Sudah 3 anggota penuh, IOTC, CCSBT, WCPFC. Dan anggota tidak penuh di IATTC.
- Spesies yang dikelola RFMO; tuna, billfish, neritic tuna, seerfish, sharks dan rays, sea turtles seabirds, sea mammals, other finfish.
- Stok madidihang merah di iotc.
- Ada 8 arah focus kegiatan; ini berkaitan dengan data. Perbaikan data tuna, pengendalian rumpon, perbaikan system pendaftaran kapal, CPIB dan catch sertifikasi, implementasi harvest strategy untuk tuna di kepulauan, implementasi RPP TCT, partisipasi Indonesia dalam forum internasional, pemanfaatan peluang penangkapan ikan tuna di ZEE dan laut lepas.
- Tipe data yang dibutuhkan: estimasi hasil tangkapan, jumlah kapal aktif, data catch dan effort, Data agregat Catch & Effort, Data komposisi ukuran hasil tangkapan.
- Data oleh RFMO digunakan untuk status stok, rekomendasi ilmiah untuk pengelolaan stok ikan yang dikelola RFMO (Total Allowable Catch/Kuota, Catch Limit, Effort Limit, Close/Open Season dan Area, dll).

- Jika tidak patuh dalam penyampaian data ke RFMO, maka ketidakpastian dalam stock assessment dan pengelolaan sumber daya, tertutupnya akses pasar internasional dan juga sentiment negative dari negara anggota.
- Log book adalah kewajiban dan mempengaruhi tingkat kepatuhan di RFMO.

Pak Afzil Ramadian
Penerapan Log Book Perairan Darat

- Pentingnya data dan informasi dalam perairan darat.
- Perairan darat di support oleh RPJMN 2020-2024
- Kondisi umum perairan darat dengan pendekatan swot
- Ada 14 WPP perairan darat.
- Kriteria log book perairan darat: Isian LBPI harus simple, memenuhi kebutuhan data dan pengelolaan.
- Pengumpulan data dilakukan oleh dinas untuk SIDAT, penguatan system data dan informasi perairan darat.
- Di perairan darat tidak ada titik koordinat seperti penangkapan ikan di laut.
- Kebutuhan data di perairan darat: di support oleh berbagai pihak.
- Penyesuaian data di perairan darat, penggunaan alat tangkap masih menggunakan nama darat. Maka dari itu perlu penyesuaian
- Pembagian WPP berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), karakteristik pulau-pulainya.

Q&A

Question:

Pak Sarwono:

1. Belum terlihat kemampuan LPP WPP dalam menentukan arah kebijakan, kuota, RPP, data, dsb. Bagaimana nanti kedepan agar peran LPP WPP menjadi maksimal?
2. Nelayan lokal, ada yang izin pusat yang menangkap di 712 (Pel. Cawangan)? Kuota nelayan andon?

Answer:

Pak Fery: Peran LPP diharapkan berperan untuk pembagian kuota. Kuota dibagi jadi 3, rekreasional fishing, skala industry dan local. Membedakannya dari ukuran kapal. Jika izin pusat masuknya industry. Dibawah 30 GT itu local. Dalam 1 WPP ada beberapa provinsi. Pembagian berdasar jumlah kapal, laporan log book, (yang diterima tiap provinsi bisa berbeda-beda). Untuk kuota nelayan andon seharusnya provinsi yang menerima nelayan andon tersebut yang termanfaatkan kuotanya.

Pak Aris Budiarto: Mekanisme pembagian kuota tidak langsung ke nelayann, tapi bisa koperasi atau lainnya. Kalau industry itu langsung ke pelaku usaha atau perusahaan. Juga meminta masukan dari komnaskajiskan. Agar kebijakan pembagian kuota benar2 adil dan punya peluang sama dalam pemanfaatan SDI.

Verifikasi hanya berasal dari log book saja, tidak dari LPM. Nelayan andon harus beralih ke izin pusat jika melintas batas provinsi (lebih dari 12 mil). Simulasi perhitungan itu berdasarkan 3 prinsip: prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan dan jumlah kapal per wilayah.

HARI 2 (6 APRIL 2023)

SESI PEMAPARAN MATERI (PANEL) HARI 2

SESI 1

Pak Banjar Dwi Sasono (PPN Prigi)

Penerapan e Log Book Penangkapan Ikan di PPN Prigi

- Armada di Prigi purse seine, pancing tonda, pancing ulur, gill net dan payang. Terbanyak adalah pancing ulur, yaitu < 10 GT sebanyak 657 armada.
- Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan e Log Book: Memandu secara langsung ke kapten, fasilitas WiFi, pelayanan sabar, tekun, dan berkelanjutan.
- Inovasi pelaksanaan e log book: Penyuluhan, contoh visual, brosur, sosialisasi e log book.

Pak Tukimun (PPS Nizam Zachman)

Penerapan E Log Book Penangkapan Ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta

- Per hari ini sudah 20 kapal pasca produksi masuk. Data produksi ikan yang didaratkan thn 2022 135.660.195 Kg (Rp. 3,10 T).
- Kapal yang melakukan aktivasi E log Book terbanyak adalah purse seine.
- Permasalahan LBPI: Kerusakan HP, penangkapan sudah dikirim tapi tidak masuk ke system, nahkoda kurang terbuka terhadap data yang dilaporkan, tanggal penangkapan hanya terisi satu tanggal. Beberapa log book di tulis di darat.
- Strategi penerapan e log book: sebelum keberangkatan kapal; Wajib aktivasi e log book sebelum SPB terbit, edukasi cara pengisian. Saat kapal datang; konversi pelaporan data log book ke aplikasi e-PIT, Penguatan kepatuhan; sanksi administrasi ke kapal yang melanggar ketentuan LBPI dengan memberikan stempel merah pada lembar STLBKK dan penundaan SPB.

Mas Herman (AP2HI)

Pembelajaran Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan

- Logo Indonesian-tuna sebagai branding bahwa produk Indonesia mendukung perikanan berkelanjutan. Dengan adanya logo ini pada suatu produk HL dan PL, maka telah terjamin bahwa produk tersebut telah dipastikan mengakomodir aspek-aspek ramah lingkungan, kepatuhan dan keberlanjutan dalam proses penangkapan hingga dikonsumsi (dari hulu ke hilir).
- Mendorong kapal perikanan pentingnya melaporkan hasil tangkapan menggunakan log book. Sebagai bentuk kepatuhan pelaku usaha perikanan (perusahaan, pemilik

kapal, nelayan, dll) terhadap aturan nasional dan sekaligus sebagai standar sertifikasi.

- Agenda: Lokasi pelabuhan operasional HL&PL, jumlah kapal HL&PL di pelabuhan, jumlah dan identitas kapal diaktivasi e log book, tantangan dan strategi serta rencana.
- PP. Sape, PPI Lappa, PPI Wameo/PPI Pasarwajo ada informasi bahwa mereka belum menerapkan e/log book pada kapal > 5 GT. Sehingga kami sangat mendorong satker UPT Pusat/UPT Daerah untuk mengakomodir penempatan operator logbook dalam rangka penerapan logbook/e-logbook di pelabuhan-pelabuhan tersebut.
- Implementasi e log book untuk nelayan HL 1 GT, yaitu di kapal Asyita. Sudah ada 16 trip, sejak diaktivasi 16 September 2022. Kendala yaitu cuaca dan ombak yang tidak baik.
- Tantangan: tidak semua lokasi ada syahbandar, aplikasi harus di update di tengah laut, lupa menekan tombol berangkat saat akan melaut sehingga baru ditekan saat di tengah perjalanan, pada saat operasi itu lupa menekan setting sehingga baru di tekan setting saat meninggalkan fishing ground, saat gelombang tinggi menyebabkan hp error dan tidak bisa digunakan.
- Peralihan e-logbook menjadi E-PIT: menu pada system e-PIT memiliki perbedaan dengan menu pada E-Log book, sehingga menimbulkan kebingungan nelayan.
- Saran pengembangan E-PIT: informasi titik rumpon dan spesifikasinya (material, menetap, hanyut, dsb) dan informasi ETP dimasukkan ke aplikasi.
- Strategi dan rencana AP2HI: Rencana AP2HI: Penerapan log book digunakan untuk verifikasi produk, ketelusuran produk, penilaian kepatuhan nelayan, standar sertifikasi dalam rangka peningkatan akses pasar global.
 - > 5 GT mendorong KKP dan mitra untuk meningkatkan penerapan penggunaan e log book pada perikanan HL dan PL.
 - < 5 GT potensi menerapkan e log book pada rantai AP2HI dengan memfasilitasi device < 5 GT.

Q&A

1. PPN Ternate

Untuk AP2HI;

Apakah aplikasi e log book yang diterapkan AP2HI sudah terintegrasi dengan aplikasi e log book E-PIT.

Bagaimana proses verifikasi? Apa ada verifikator sendiri apa menggunakan yang sudah disediakan oleh PSDI?.

Sharing dari PPN Ternate; kendala klasik yaitu keterbatasan sdm nelayan, mengici log book saat pendaratan, sudah di aktivasi tapi tidak dibawa melaut HP nya. Kapal melakukan bongkar di 2 pelabuhan.

Untuk PSDI; petugas verifikator, ada kapal yang tidak melakukan bongkar di pelabuhan tapi proses verifikasi diajukan ke PPN Ternate. Misalnya pendaratan di PPS Bitung, tapi pengajuan verifikasi di PPN Bitung. Apakah hal tersebut memang

terjadi?. Proses verifikasi bisa dilakukan oleh observer, biasanya kapal yang seperti itu bisa langsung di verifikasi oleh observernya.

Answer:

Mas herman: aplikasi sudah ter update ke E PIT. Semenjak terupdate, nelayan belum aktif melaut. Pada musim tertentu mereka tidak menangkap tuna. Verifikator adalah petugas PPN Ambon, mengaktifkan dan memverifikasi datanya. AP2HI hanya ikut mendorong, yang memverifikasi dari pelabuhan.

Pak Tukimun: setelah diperlakukan PNBP Pasca Produksi, data log book dengan timbangan itu memang berbeda jauh. Perlu dibekali cara estimasi jumlah ikan dalam palka kapal ke petugas enumerator.

Pak Banjar: permasalahan tersebut memang sering terjadi. Apabila penerapan E PIT terlalu diawasi oleh banyak pihak, maka bisa saja menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mereka.

Kesimpulan: Perlu komunikasi antara petugas, pemilik kapal, nelayan, salah satunya dari PPSNZJ dengan tanda merah. Untuk nelayan kecil bisa dilakukan dengan kaitannya BBM. Selain itu terdapat beberapa kendala dalam pengisian e-logbook di lapangan termasuk juga setelah peralihan/perubahan aplikasi e-logbook menjadi aplikasi E-PIT.

SESI 2

Dian Novianto (BRIN)

Jenis data:

1. Tidak ada data: maka tidak ada Analisa yang dilakukan.
2. Poor data: analisis sangat hati-hati
3. Good data

Pengumpulan data perikanan:

Fishery-dependent data

Fishery-independent data

Dukungan riset:

1. mendukung dan Bersama-sama secara aktif menelaah dan merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan LBPI.
2. Menyusun boring program log book dan observer
3. Menyediakan tenaga pelatih
4. Mengkomunikasikan hasil pada forum regional
5. Group diskusi untuk update terkait isu yang berkembang

Santri Dinalhusna (MDPI)

Pembelajaran Program Log Book Pada Nelayan Kecil

Kerja sama antara MDPI dengan KKP.

Program pelaksanaan logbook dilaksanakan mulai tahun 2016-2019 dalam bentuk fisher log. 2020-2022 log book yang disederhanakan. Uji coba e log book pada 2022.

Flow data log book yang digunakan menggunakan skema sertifikasi fair trade: standar dimana nelayan harus mencatat setiap trip penangkapan. Ada skema pembayaran insentif untuk pengisian log book Rp500-1000.

Program log book sudah sejak 2016, dengan tertinggi tahun 2021.

535 nelayan telah mengisi log book.

Komposisi masih oleh nelayan YFT dan SKJ.

Pembelajaran log book skala kecil:

Pengisian setelah pendaratan

Nelayan yang kurang bisa baca tulis

Motivasi pengisian rendah, sehingga inisiatif ada insentif

Masih tidak lengkap pengisian borang

Belum ada mekanisme pengumpulan data, input, verifikasi dan validasi data hasil log book.

Tidak semua trip mengisi log book,

Implementasi e log book

Uji coba dilakukan ke nelayan champion, di nelayan maluku dan maluku utara.

Fasilitasi HP dan paket internet.

Pilot project 2022-2023.

Timeline pilot project:

Sosialisasi e log book.

Implementasi: pelatihan ke nelayan, mencatat perjalanannya.

Presentasi capaian hasil uji coba.

Presentasi anggota tuna.

Tahap pilot project:

Identifikasi champion, pengadaan alat, sosialisasi dan aktivasi e log book nelayan, komunikasi dan pendampingan MDPI-Nelayan, implementasi pilot project, langkah selanjutnya (aplikasi pembelajaran, replikasi nelayan baru, survey kualitatif FTUSA).

Tantangan:

- Sulit mendefinisikan setting; karena nelayan menggunakan rumpon jadi per rumpon
- Tida ada pelabuhan perikanan terdekat
- Jaringan internet
- Bimtek validasi
- Penyederhanaan e log book
- Spesies tidak ada berat dan jumlah ikannya.
- Nelayan kecil multispecies

- Perlu ekstrak row data
- Tanggal upload ada yang lebih awal daripada pengirimman data
- Tidak semua nelayan punya dokumen kapal

Rekomendasi:

Nelayan kecil yang menggunakan e log book diberikan kemudahan akses BBM.

Shinta (YKAN)

Implementasi CODRS-ELOGBOOK Pada Perikanan Skala Kecil

CODRS image base data collection, menggunakan foto. Dapat diverifikasi oleh siapapun dan kapanpun.

Incentive: per bulan

Tujuan: meningkatkan akurasi dan efisiensi pendataan log book.

Implementasi e log book-CODRS pada perikanan demersal di Bontal

Dukungan:

Pendekatan pada kelompok Nelayan alam bahari.

Pelatihan kepada nelayan yang akan berpartisipasi.

Penyediaan HP.

Aktivasi dibantu PSDI.

Penempatan observer untuk pendaratan ikan.

Dari CODRS mendapat data Panjang. Verifikasi pendaratan oleh observer, estimasi total tangkapan dari nelayan, estimasi total tangkapan.

Kesenjangan hasil pendataan;

Hasil tangkapan log book lebih kecil daripada di CODRS

Kenapa nelayan under reported di log book?; mereka tidak tepat dalam melakukan estimasi berat di laut, ada beberapa spesies yang tidak ada di e log book, kesadaran nelayan dalam melakukan pelaporan rendah.

Identifikasi jenis hasil tangkapan ikan:

Nelayan tidak mengenal spesies yang tertulis di dalam aplikasi log book, ikan yang dilaporkan tidak tercantum.

Monev: banyak nelayan yang aware bahwa penggunaan log book ini penting.

Kesimpulan:

Pelaporan nelayan e log book underestimated dibandingkan data CODRS.

Perbedaan identifikasi hasil tangkapan antara pelaporan nelayan dalam aplikasi e log book dan identifikasi teknis CODRS.

Lokasi penangkapan tidak berbeda jauh.

Image base ternyata bisa untuk verifikasi ulang dan memberikan peluang pengambilan data Panjang.

Nelayan mulai paham pentingnya data perikanan.

Rekomendasi:

Dilakukan verifikasi agar kualitas tetap tidak terjaga.

Tidak perlu ada sitasi penemu di belakang spesies.

Peningkatan kompetensi enumerator/observer.

Menambah jenis ikan kakap kerapu.

Perlu identifikasi hasil tangkapan yang cepat dan tepat sesuai standar.

Pengumpulan data basis image perlu diintegrasikan.

Q&A

Question

1. PPN Ternate

apakah aplikasinya sudah terintegrasi oleh PSDI?. Karena data tersebut tentu itu dibutuhkan untuk penentuan kuota.

Proses verifikasi dilakukan oleh siapa?.

2. Pak Ilham

Untuk MDPI:

Berapa persen yang memberikan pernyataan berikut?

Ada korelasi dengan hasil pendampingan?

Kecenderungan nelayan yang mengisi apa? Apakah karena ada insentif?

Untuk YKAN:

Untuk tuna apakah CORDS progressnya sejauh apa?

Pengenalan jenis ikan untuk identifikasi tuna secara otomatis seperti apa?

Apa sisi kelebihan dari pendampingan oleh MDPI dan YKAN?

Rencana YKAN apa hanya untuk nelayan skala kecil atau ada di perikanan skala besar?.

Untuk mas dian:

Dukungan riset dibutuhkan dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data log book.

Posisi riset perikanan seperti apa?

BRIN ada program yang sifatnya capacity building, untuk melatih dari daerah atau provinsi?

Agar pengolahan dan analisis data dapat dilakukan dengan cepat itu bagaimana? Di amerika dipisahkan si pengumpul data dan pengolah data itu dipisah.

3. Pak Ali

Integrasi log book.

Produk tuna ASTB terkendala di sertifikasi, padahal Harsam diterima. Berhubungan dengan log book.

Answer

1. Bu Sinta:

Ada I fish community, belum terintegrasi dengan PSDI. Tapi memberikan akses data ke PSDI. Setiap yang dilakukan itu hasil kerja sama dengan PSDI.

Prorges AI untuk tuna masih belajar, masih mengumpulkan bagaimana morfologi dll. Untuk small pelagic pendataan bisa segera dimulai.

Sisi kelebihan pendampingan yang dilakukan, penerapan itu di tempat yang pendataan e log booknya masih kurang, yaitu khususnya 713. Di donggala sudah kapal 20 GT ke atas.

Untuk ke depan tidak hanya nelayan tuna kecil,

2. Mba Santri

Sudah mempunyai platform yang terhubung dengan KKP, yaitu I fish. Aplikasi masih dalam tahap pilot project, karena ini untuk kapal >30 GT. Pengaplikasian terkendala dengan jauh dari pelabuhan, jadi mendaratkan masih di perkampungan. Untuk aktivasi masih bantuan observer. Untuk verifikasi masih dari tim lapangan.

Koperasi sudah ada di jambula.

Proses verifikasi; masih di verifikasi oleh nelayan. Nanti akan dikolaborasi dengan KKP.

Nelayan masih diminta untuk mengisi di paper base, antisipasi jika ada kendala di e log book.

Korelasi antara quote dengan yang di lapangan; tanpa paksaan, nelayan sangat antusias. Ada nelayan yang menggunakan HP sendiri. Dari 11 nelayan, semua memilih menggunakan e log book. Karena menggunakan log book harus mengingat hasil tangkapannya, jadi bisa mengisi sendiri hasil tangkapannya.

Kecenderungan; mereka antusias.

3. Pak Dian

Apabila ingin melakukan riset itu mengajukan proposal.

Riset penelitian di BRIN tidak spesifik untuk perikanan. Dibuka untuk siapa saja, dan berlomba mendapatkan itu.

Jika memakai periset maka perlu surat ke BRIN.

Mempermudah penyiapan data sampai analisis itu ada pembagian fungsi dan tanggung jawab. Ada berbagai tahapan sampai ke pengambilan keputusan.

4. Bu Sinta

Log book tidak terpisah dengan PSDI.

5. Mba Santri

Aplikasi juga tidak terpisah dengan yang PSDI. Perlu sosialisasi mengenai e PIT.

Saran: untuk meningkatkan kepatuhan, perlu adanya insentif dari dana premium Fair Trade misalnya..

SESI 3

**Pak Aris Budiarto (PSDI KKP)
Penerapan LBPI di 2022**

Dasar hukum log book:

UU 45/2009, UU 27/2021, Permen KP 33/2021, Perdirjen PT 11/2018, dan CMM RFMO IOTC.

LBPI sudah ada dari 2010, masih bersifat manual, terus berkembang hingga 2023. Permen KP 33 tahun 2021; kapal di atas 5 GT harus e log book, tidak boleh dibantu oleh petugas.

Perkembangan jumlah kapal yang menerapkan log book semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 3 tahun terakhir penerapan e log book lebih dominan daripada log book.

Log book setelah masuk di SILOPI, selanjutnya di verifikasi oleh petugas P3T. ada 10158 trip yang belum di validasi.

Variable penilaian pelabuhan dalam penerapan LBPI; nilai kepatuhan, penerapan LBPI, aktivasi e log book, surat klarifikasi, surat rasio SPB LBPI.

Aktivasi e LBPI ada 12513 unit kapal penangkapan ikan di 64 lokasi pelabuhan perikanan. Alur proses data LBPI: diisi, diserahkan ke petugas, oleh petugas dilihat kesesuaian dan kelengkapan data. Kalau e log book masuk ke SILOPI, petugas melihat kelengkapan dan kesesuaian data. Ada 6 variabel untuk verifikasi.

Pengaturan LBPI dalam pelaksanaan kebijakan PIT. Dilihat pelaporan data LBPI baik nelayan kecil maupun besar. Pelaporan log book disampaikan ke KKP. Hal tersebut untuk menghitung realisasi pemanfaatan kuota penangkapan ikan dan penerbitan tagihan PNBPN pasca produksi.

Jika alih muatan disesuaikan dengan lokasi dimana dia melakukan transshipment. Yang membayar pasca tetap kapal penangkap, bukan kapal pengangkutnya.

Jika ada ketidaksesuaian maka harus dilakukan penyesuaian sebelum STBLKK diterbitkan. Kalau sudah sesuai akan divalidasi.

Rencana pengembangan LBPI; ada 4 rencana.

Sri Patmiarsih (PSDI KKP)
Evaluasi penerapan LBPI tahun 2022

Peran LBPI untuk SDI: data, kemudian diolah dan dianalisis, untuk membentuk pengelolaan. LBPI berkontribusi untuk penyampaian ke RFMO. LBPI untuk mengetahui fishing ground.

Kapal lapor LBPI tahun 2022

Isu: coverage masih rendah, kapal sd 5 GT yang lapor LBPI masih rendah.

Alat tangkap yang dominan lapor LBPI tahun 2022 adalah purse seine.

Verifikasi data LBPI tahun 2022: 28% trip belum divalidasi sebanyak 10158 trip.

Dari 6 variabel yang dipakai untuk kepatuhan data LBPI; diitung tingkat kepatuhannya. VMS terkendala masih banyak yang tidak mengaktifkan. Produksi penangkapan ikan yang patuh ada 61%. Kendala masih mengenai daerah penangkapan ikan, mengenai penempatan titik setting.

Sebaran daerah penangkapan ikan API Handline: di Halmahera jaraknya dekat tapi sudah di ZEE, jadi nelayan kecil terhitungnya menangkap di ZEE.

Di 572 banyak ikan pelagis kecil di territorial, itu akan di cek dominan kapal ukuran berapa yang menangkap disitu.

Beberapa ketidaksesuaian: salah identifikasi, penangkapan di daerah potensi tuna tapi menekan setting di 712, terjadi penitipan hasil tangkapan.

Tantangan: sarana dan prasarana diharapkan dapat diperbaiki.

Upaya: dukungan anggaran melalui dana dekon untuk peningkatan penerapan LBPI, meningkatkan kerjasama dengan LBPI, mendorong DKP dan PerProv untuk menyediakan SDM untuk pelaksanaan di setiap UPTD, perbaikan aplikasi.

Juknis

Tatat Cara Verifikasi:

- Koordinat penangkapan ikan
- DII

Yang baru

- Proses verifikasi terpisah dengan validasi

Pak Ade Setia Januar (PSDI KKP)

Data Pemantau Di Atas Kapal Perikanan Dalam Mendukung Validasi Data Log Book Penangkapan Ikan

Syarat:

1. altang purse seine dan long line
2. di WPPNRI > 30 GT; pancing, purse seine, jarring angkat, dan jarring insang
3. kapal pengangkut ikan di WPP NRI dan LL
4. kapal penangkap direkomendasikan atas laporan LBPI dan penangkap/pengangkut diusulkan untuk keperluan riset/tujuan tertentu (MSC, FIP, MDPI, PIT).

Jumlah observer: regular (aktif) : 75

Ada 76 observer. Di 27 lokasi. Rencana berikutnya hanya di 15 lokasi pelabuhan.

Hak pemantau: perlindungan, gaji dan uang layer, komunikasi, akomodasi, dan alat kerja.

Gaji masih UPM dimana bertugas. Uang layer masih dikaji. 150k/hari untuk uang layar.

Kewajiban observer: menjaga rahasia data, melaporkan hasil pengamatan, memeriksa. Ketika belum on board maka ditugaskan untuk port sampling, membantu verifikasi log book (verifikasi yang masuk ke SILOPI).

Tahapan pelaporan data pemantau: verifikasi, validasi, analisis, pengampilan keputusan.

Tata cara pelaporan pemantau di atas kapal: memeriksa isi boring, diajukan kepada petugas verifikator, verifikator data pemantauan di atas kapal perikanan, hasil verifikasi boring pemantau kepada pemantau lulus atau tidaknya, baru diserahkan.

Peran data observer dalam mendukung validasi data LBPI

Terintegrasi dengan data log book sebagai bahan sandingan dalam memverifikasi data log book, akurasi lebih tinggi dibanding data log book, kompetensi, keragaan data (lebih beragam karena selain operasional juga data biologi seperti berat, tkg).

Rencana aksi tahun 2023

Peningkatan kapasitas observer, perbaikan kualitas data dan analisis data observer, .

Pak Ilham (PSDI KKP) Data LBPI dalam Mendukung Kebijakan PIT

Kebijakan yang tepat dan berbasis data saintifik terbaik.

Variable utama: kuota, zona, pengawasan, kapal, penarikan PNBP, sinergi.

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan itu membutuhkan data > stok assessment > science advice > fisheries management.

Peran data dalam pengelolaan perikanan

Kalua data lemah, maka kebijakan lemah, pengawasan juga lemah.

Kalau data kuat maka kebijakan juga kuat dan pengawasan juga kuat.

Data:

Observer on board

Port sampling

Fishing log book

E PIT:

Izin pusat ada akun untuk nahkoda dan pelaku usaha. Kenapa? Data nahkoda masih data ragu karena kemungkinan ada data selisih karena tidak dilakukan penimbangan.

Untuk izin daerah hanya nahkoda.

Saat ini ada pernyataan data nahkoda bahwa itu data benar.

Pak Iwan (IT PSDI KKP) Pengenalan dan praktek aktivasi e LBPI dalam aplikasi e-PIT

Sebelum nahkoda dapat mengisi log book harus aktivasi untuk mendapat akun bagi nahkoda atau pemilik kapal. Ada dua metode izin pusat dan daerah.

Spesifikasi teknis: android 6 (lollipop), ram 3 GB, Storage 4 GB, GPS, kamera.

Alur permohonan aktivasi E PIT:

Pusat: dilakukan secara mandiri. Register e PIT, mengirimkan link email.

Daerah: menu permohonan, isi form permohonan, verifikasi permohonan, cetak tanda terima. Identifikasi device ID Gawai. Klik logo e-PIT 11x muncul device id. Petugas log book memilih baru > tambah > input no sipi > dll. Email pemohon penting karena akan menerima rekapitulasi data yang dikirimkan oleh nahkoda di emailnya.

Izin pusat, data akan otomatis terikirim ke email yang SIUP.

Hal yang perlu diperhatikan:

Kapal izin pusat dilakukan secara mandiri melalui E PIT. Untuk kapal izin daerah melalui aplikasi admin e log book.

Kapal izin pusat akun lama tidak bisa menggunakan akun lama yang berbasis aktivasi Damping nahkoda untuk cara menggunakan aplikasi GPS Test untuk mengetahui kualitas penerimaan sinyal GPS.

Tombol berangkat/setting tidak akan bisa di klik jika status GPS belum lock (status 3D Fix di aplikasi GPS Test).

Question

1. Mba Santri

Untuk Pak Iwan

Ada kendala: update log book ke e pit harus login lagi. Yang log in lagi bagaimana caranya?

Bantu untuk verifikasi siapa?

Apakah aplikasi GPS boleh menggunakan apk GPS yang lain?

Apabila nelayan balik karena cuaca buruk, mereka sudah mengklik berangkat, besoknya tidak bisa dikirim.

Apakah MDPI bisa mendapat untuk akses data nelayan dampingannya?

2. Pak Tukimun

Dengan adanya pasca kecenderungan untuk turun produksinya, log book untuk tolak ukur kebijakan, berdampak pada kuota. Langkah PSDI untuk mengatasi ini?

Jumlah observer masih kurang. Memperbanyak kembali observer untuk mendukung program pasca.

3. Bu Sinta

Akan ada gap antara yang ditangkap dengan yang didaratkan, estimasi gapnya berapa?

Yang dijadikan PNBPN yang mana?

4. Pak kalabuh

Log book menjadi syarat untuk e PIT, jadi tidak hanya no log book no SPB. Hasil tidak dipertimbangkan karena masih berfikir hanya agar mendapat SPB.

5. PPN Kejawan

Dasar penempatan observer itu apa?

Untuk aktivasi log book hanya 1, yaitu nahkoda. Jika hp hilang, solusi bagaimana?

Answer

1. Pak Iwan

Untuk bu santri:

Ketika aplikasi sudah terupdate, maka berlaku rules yang baru. Bisa di clear data dan lakukan log in ulang. Jika daerah, selama device id tidak berubah maka log in ulang.

Yang mendampingi aktivasi: dari pusat, mungkin akan terhambat di klik email karena itu ada di pemiliknnya. Kalau izin daerah tergantung siapa yang punya akun untuk akun ini.

Cek sinyal bisa memakai apk GPS lainnya.

Syarat dari PIT, harus dituntaskan dulu dengan upload data. Jika itu bisa dilakukan inisiatif klik 1 setting tapi tidak diisi hasil tangkapan, lalu catatan nahkoda ditambahkan, "cuaca buruk, tidak ada hasil tangkapan".

Saat ini user hanya untuk operator, belum bisa dibagikan.

Bu Sinta:

Tahapan PNBP, data yang dihitung adalah data yang disampaikan pada LPM, akun yang disesuaikan oleh pemilik kapal. LPM ini menarik data awal yaitu log book yang disubmit oleh nahkoda pertama kali. Tidak boleh lebih kecil dari data log book.

2. Pak Aris Budiarto

Ada kecenderungan melaporkan data semakin kecil, karena PNBP linear dengan pembayaran pajak.

SDI mengatasinya dari log book dan kuota. Menugaskan observer di kapal.

Observer penempatan dan mulai berlayar itu dari pelabuhan itu. Penempatan di Muara Baru, on board di Muara Baru, jangan dari Mayangan atau lainnya.

Penempatan observer masih berdasarkan permintaan, dari bagian pelabuhan belum.

Ada wacana bahwa nanti akan dibersamakan dengan pelabuhan (tahun depan).

3. Pak Iwan

Kapal yang diverifikasi memang sesuai dengan yang sesuai dengan otoritasnya.

4. Pak Ilham

Yang melakukan verifikasi itu adalah pelabuhan pangkalan.

Kuncinya pemerintah tegas dengan penegakkan hukum.

5. Pak Ade

Dilakukan pendekatan ke nelayan/pemilik.

Kalua kapal menolak observer maka tidak boleh diterbitkan SPB.

Ada rencana rekrutmen 80 observer, namun ini berdasarkan data PNBP.

6. Pak Ade

Dasar penempatan observer seperti yang sudah disebutkan di slide.

7. Pak Iwan

Akun bisa dimasukkan ke beberapa HP.

Point:

1. Penerapan LBPI di 2022 terus berkembang dan semakin efektif, dimana sudah terdapat di 64 lokasi.
2. LBPI penting dalam pengelolaan perikanan.
3. Tingkat validasi sudah ditekan oleh pusat dari 28% yang belum divalidasi menjadi 19% hingga saat ini.

Side Meetings	:	
Contact Made	:	
Follow up	:	
Reported by	:	Herman dan Rengga Retno Laila Saputri
Picture if any	:	



